



**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
BIRO PERENCANAAN DAN KLN**

**KAJIAN INTEGRASI DAN SINERGI ANTAR K/L
DALAM RANGKA PPDT
(PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL)**

DRAFT LAPORAN AKHIR



KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini memuat [1] Tujuan dan Manfaat, Sasaran Kegiatan serta Alur Pikir, [2] Kerangka Teoritis, [3] Kerangka Kerja dan Definisi Operasional, dan [4] Skema Penyusunan Model, dan [5] Pembahasan hasil FGD yang akan digunakan sebagai dasar dalam finalisasi model akhir integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana, dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh K/L yang terlibat dalam melakukan intervensi pembangunan di daerah tertinggal guna percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Laporan Akhir ini merupakan salah satu output dari kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Laporan Antara ini menyajikan Pembahasan hasil FGD dengan kementerian dan lembaga yang terlibat serta finalisasi model akhir integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L yang akan dijadikan pedoman bagi K/L tersebut dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal

Akhir kata, kiranya laporan akhir ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Desember 2013

Ketua Tim Pelaksana



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	I-1
1. 2. Tujuan Kegiatan	I-2
1. 3. Sasaran dan Dampak Kegiatan	I-2
1. 4. Ruang Lingkup Kegiatan	I-3
1. 5. Landasan Hukum	I-3
1. 6. Alur Pikir	I-4
1. 7. Output Kegiatan	I-6
1. 8. Sistematika Laporan	I-6
1. 9. Jadwal Kegiatan	I-7
BAB II. KERANGKA TEORITIS (TINJAUAN EMPIRIS, KONSEPTUAL, DAN KEBIJAKAN)	
2. 1. Konsep Perencanaan.....	II-1
2. 2. Government Policy.....	II-7
2. 3. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	II-19
BAB III. KERANGKA KERJA DAN DEFINISI OPERASIONAL	
3. 1. Kerangka Kerja	III-1
3. 2. Definisi Operasional.....	III-5
BAB IV. SKEMA PENYUSUNAN MODEL	
4. 1. Matrik Potensi 10 K/L Berdasarkan Sasaran Kegiatan	IV-1
4. 2. Sinkronisasi Kebijakan KPDT dan K/L	IV-7
4. 3. Model Integrasi Dan Sinergi Antar K/L Dengan KPDT	IV-8
BAB V. KAJIAN MODEL SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN	
5. 1. Hasil <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>	V-1
5. 2. Integerasi dan Sinergi	V-2
5. 2. 1. Integerasi Internal KPDT.....	V-2
5. 2. 2. Sinergi Antar K/L.....	V-6
BAB VI. PENUTUP	
REFERENSI	



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
Gambar 1.1	Pola Pikir Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	I-5
Gambar 2.1	Proses Perencanaan dengan Pendekatan Perencanaan Rasional	II-4
Gambar 2.2	Pendekatan Rasional Model Proyeksi	II-5
Gambar 2.3	Pendekatan Rasional Model Perencanaan	II-5
Gambar 3.1	Tahapan Kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	III-4
Gambar 3.2	Definisi Infrastruktur	III-8
Gambar 3.3	Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan manusia	III-22
Gambar 4.1	Model Integrasi dan Sinergi antar K/L dengan KPDT	IV-8
Gambar 5.1	Peta Wilayah Daerah Tertinggal di Indonesia	V-2
Gambar 5.2	Pohon <i>Analytical Hierarchy Process</i> Penetapan Komponen Utama dan Indikator Strategi Dasar Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	V-4



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
Tabel 1.1	Jadwal Kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	<i>I-8</i>
Tabel 2.1	Ruang Lingkup Perencanaan	<i>II-3</i>
Tabel 3.1	Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM	<i>III-21</i>
Tabel 5.1	Jumlah dan Persentase Wilayah Daerah Tertinggal di Indonesia	<i>V-3</i>



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal maka diperlukan kegiatan koordinasi di semua tingkatan, baik berupa koordinasi antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan K/L di tingkat pusat, KPDT dengan pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten daerah tertinggal, maupun koordinasi lintas K/L dengan pemerintah daerah tertinggal secara nasional. Koordinasi lintas K/L diperlukan karena pembangunan daerah tertinggal berdimensi sektoral dan kewilayahan. Adapun beberapa kebutuhan yang diperlukan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur Dasar;
2. Infrastruktur Ekonomi;
3. Pengembangan Ekonomi Lokal;
4. Sarana Informasi dan Komunikasi;
5. Kebijakan Khusus.

Masalah yang terjadi selama ini belum adanya model integrasi dan sinergi antar K/L dalam pembangunan daerah tertinggal, demikian pula kebutuhan daerah tertinggal dan intervensi pembangunan juga minim informasi. Padahal pendanaan terhadap fokus pembangunan daerah tertinggal sudah lebih meningkat. Adanya penyusunan alur koordinasi/sinkronisasi tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan lintas K/L ini diharapkan akan menghasilkan sebuah dokumen (model) integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal yang didalamnya memuat kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal per-sektor, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan melalui pengintegrasian dan sinergi antar K/L sehingga dokumen (model) integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L menjadi acuan kebijakan dan implementasi intervensi pada pembangunan daerah tertinggal yang terpadu, berkualitas dan terukur.

1.2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuan dari kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

- 1). Menyusun model integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana, dan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga dalam melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- 2). Terwujudnya integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana, dan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga dalam melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Manfaat dari kajian ini adalah membantu mendorong terwujudnya integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana dan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kementrian/Lembaga dalam melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan mengacu pada sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

1.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut :

- 1). Terumuskannya model integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana, dan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga dalam melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- 2). Tersedianya data informasi agenda K/L dalam melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk tahun 2014 khususnya pada pencapaian sasaran 4 (empat) indikator utama yaitu : [1] Peningkatan angka IPM, [2] Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui PEL, [3] Perbaikan Infrastruktur, dan [4] Penurunan Angka Kemiskinan melalui Kelembagaan yang baik.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dari kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini meliputi :

- a) Perumusan draft model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- b) Penyempurnaan dan finalisasi model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui FGD dengan Kementerian yang terlibat.

Kementerian yang terlibat dalam kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini ada sepuluh kementerian meliputi : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Komunikasi & Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemilihan dan penetapan sepuluh kementerian ini didasarkan atas pertimbangan keterkaitan tugas kementerian yang ada dengan pencapaian sasaran 3 (tiga) indikator utama pada tahun 2014 yang telah diuraikan di atas.

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini adalah sebagai berikut:

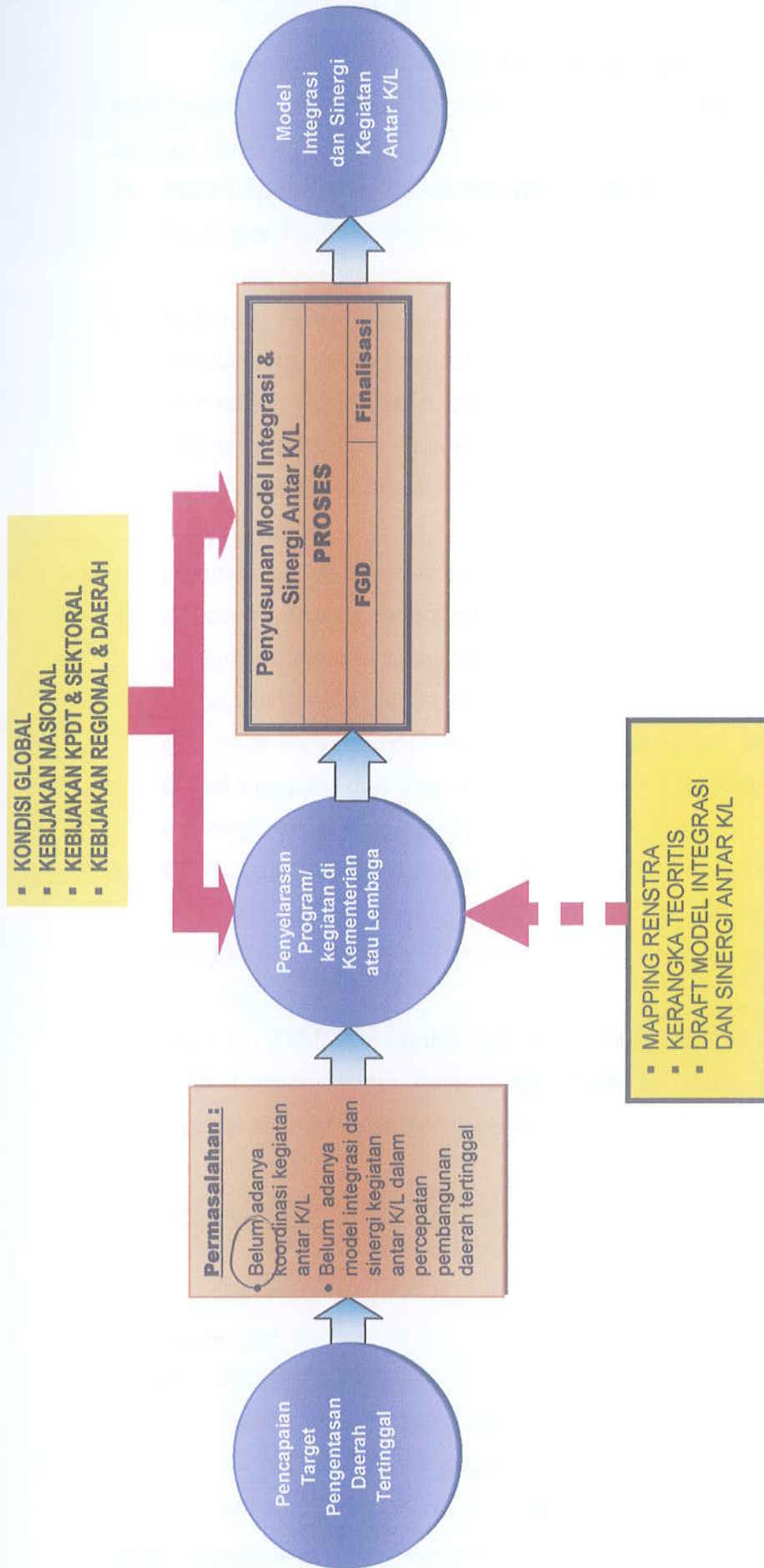
- 1). Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2). Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- 3). Undang-undang Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
- 6). Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.



- 7). Peraturan Presiden RI Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 47.
- 8). Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 06/PER/M-PDT/II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010-2014.

1.6. Alur Pikir

Alur pikir dalam kegiatan integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal ini didasari oleh belum adanya integrasi dan sinergi antar K/L dalam pembangunan daerah tertinggal termasuk minimnya informasi akan kebutuhan intervensi pembangunan daerah tertinggal. Oleh karena itu perlu dibuat dokumen (model) integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal yang didalamnya memuat kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal per-sektor, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan melalui pengintegrasian dan sinergi antar K/L sehingga dokumen (model) integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L menjadi acuan kebijakan dan implementasi intervensi pada pembangunan daerah tertinggal yang terpadu, berkualitas dan terukur.



Gambar 1.1. Pola Pikir Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

1.7. Output Kegiatan

Kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal ini akan menghasilkan output sebagai berikut:

- 1). **Draft Laporan Pendahuluan**, yang meliputi : [1] Layout isi laporan, [2] Kerangka Teoritis, [3] Kerangka kerja Dan Definisi Operasional, dan [4] Skema Penyusunan Model.
- 2). **Laporan Pendahuluan**, merupakan perbaikan dan penyempurnaan skema penyusunan model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal ini berdasarkan masukan pada saat presentasi draft laporan pendahuluan.
- 3). **Draft Laporan Antara**, merupakan penyempurnaan skema penyusunan model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal.
- 4). **Laporan Antara**, merupakan perbaikan dan penyempurnaan skema penyusunan model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal ini berdasarkan pada hasil FGD dan hasil kajian model sektoral dan kewilayahan termasuk implementasi model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal.
- 5). **Draft Laporan Akhir**, meliputi: [1] Layout isi laporan, [2] Kerangka Teoritis, [3] Kerangka kerja Dan Definisi Operasional, [4] Skema Penyusunan Model, [5] Kajian Model Sektoral dan Kewilayahan, [6] Penutup.
- 6). **Laporan Akhir**, merupakan penyempurnaan atau perbaikan seluruh bagian Draft Laporan Akhir berdasarkan masukan pada saat presentasi draft laporan akhir dan substansi pekerjaan.

1.8. Sistematika Laporan

Untuk penyusunan laporan pendahuluan dibuat sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat kegiatan, sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan, dan K/L yang terlibat. Dalam Bab I ini juga dikemukakan tentang landasan hukum,



alur dan pola pikirnya, output kegiatan, sistematika laporan, tahapan dan jadwal kegiatan.

BAB II. KERANGKA TEORITIS

Bab II mengemukakan tentang kerangka teoritis yang mendasari kajian integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

BAB III. KERANGKA KERJA DAN DEFINISI OPERASIONAL

Bab III menggambarkan kerangka kerja dan definisi operasional yang mendasari skema penyusunan model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

BAB IV. SKEMA PENYUSUNAN MODEL

Bab IV menguraikan tentang skema penyusunan model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

BAB V. KAJIAN MODEL SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

Bab V menguraikan tentang pembahasan hasil FGD dan hasil kajian model sektoral dan kewilayahan termasuk implementasi model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

BAB VI. PENUTUP

Bab VI menyajikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

1.9. Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan “Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal” secara detail diuraikan di Tabel 1.1. berikut ini.



No	KEGIATAN	TAHUN 2013																																								
		OKTOBER							NOPEMBER							DESEMBER																										
		TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL																	
1	TAHAP PERSIAPAN																																									
2	PENYUSUNAN MATRIK PEKERJAAN																																									
3	TELAAH KERANGKA TEORITIS																																									
4	PENYUSUNAN MODEL AWAL																																									
5	PENYUSUNAN DRAFT LAPORAN PENDAHULUAN																																									
6	PRESENTASI LAPORAN PENDAHULUAN																																									
7	REVISI LAPORAN PENDAHULUAN																																									
8	PENGIRIMAN LAPORAN PENDAHULUAN																																									
9	FGD PEMBENTUKAN MODEL																																									
10	PENYUSUNAN LAPORAN ANTARA																																									
11	PENGIRIMAN LAPORAN ANTARA																																									
12	PENYUSUNAN DRAFT LAPORAN AKHIR																																									
13	PRESENTASI LAPORAN AKHIR																																									
14	REVISI & PENYEMPURNAAN LAPORAN AKHIR																																									
15	PENGIRIMAN LAPORAN AKHIR																																									
16	SERAH TERIMA PEKERJAAN																																									

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

REFERENSI

- Agustino, Leo, 2006. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik", Bandung: CV. ALFABETA.
- Alexander, Ernest. 2000. "Rationality Revisited: Planning Paradigms in Post-Postmodernist Perspective". *Journal of Planning Education and Research*, 19:242-256.
- Alisjahbana, 2004. "Kebijakan Publik Sektor Informal", Surabaya : ITS Press.
- Alonso, José Antonio dan M^a Teresa Lamata. "Consistency in The Analytic Hierarchy Process: A New Approach". *International Journal of Uncertainty, Fuzziness And Knowledge-Based Systems*. Vol.14, No.4 (2006) 445-459. Ó World Scientific Publishing Company.
- Baum, H. 1996. "Why Rational Paradigm Persists: Tales from the Field." *Journal of Planning Education and Research*, 15(2): 127-135.
- Calabro, dkk. 2011. *The American Heritage Dictionary of the English Language. Fifth Edition*. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. New York. USA.
- Carlsson, L. and Sandstrom, A. 2008. "Network Governance in Commons". *International Journal of the Commons*. 2(1): 33-53. Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services for IASC.
- Conyers, Diana dan Peter Hills. 1990. "Chapter 5". Dalam *An Introduction to Development Planning In the Third World*. John Wiley & Sons.
- Covey, S.R., 1989. *The Seven Habits of Highly Effective People*, Simon and Schuster, New York.
- Davidoff, Paul. 1965. "Advocacy and pluralism in planning", *Journal of the American Institute of Planners*, 31(4): 544-55.
- Ernan Rustiadi, Ernan dkk. 2003. *Seminar Menuju Perencanaan pada Era Masyarakat Madani 28 Juli 2003*. Program Studi Teknik Planologi dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).
- Grindle, M.S., (editor), 1997 *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA : Harvard Institute for International Development.
- Government Program Management, Bruce T Barkley, Sr. 2011, McGraw Hill Book Companies, USA.
- FTSE. 2012. *The FTSE Infrastructure Index Series: Defining dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)*.



- Healey, Patsy. 1996. "The communicative turn in planning theory and its implications for spatial strategy formation." *Environment and Planning B: Planning and Design*, 23: 217-34.
- Islamy, Irfan, 2003. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ja'far, Marwan. 2007. *Infrastruktur Pro Rakyat: Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21. Cetakan 1. Penerbit Pustaka Tokoh Bangsa*. Yogyakarta.
- Kaho Josef Riwu, 1991. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Krumholtz, Norman dan P. Clavel. 1994. "Introduction: Professional Support for Equity Planning?" In *Reinventing Cities*. Philadelphia: Temple University Press. Hal. 1-22.
- Luzi, S., Hamouda, M.A., Sigris, F., Tauchnitz, E. 2008. *Water Policy Network in Egypt and Ethiopia*. *The Journal of Environment & Development*. 17(3): 238-66. Sage publication.
- Milen, Anelli, 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makasar, Indonesia : ALFABETA.
- Pokja Sanitasi Kabupaten Sampang. 2013, "Program Percepatan Pembangunan sanitasi Pemukiman (PPSP), Buku Putih Sanitasi.
- Rivai, Veitzal dan Mulyadi, 2009 *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003. "*Kebijakan Publik*", Yogyakarta : Balaiurang.
- Todaro, Michael. P. 2000. "Chapter 16" Dalam *Economic of Development*, 8th Edition, Addison-Wesley.
- Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara)*,: Bumi Aksara, Jakarta.
- Webber, M. 1983. "The Myth of Rationality: Development Planning Reconsidered." *Environment and Planning B: Planning and Design*, 10: 89-99.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Widodo, Joko, 2006 *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Wasserman, Stanley and Faust, Katherine. (1994). *Social Network Analysis: Method and Application*. Cambridge University Press. Cambridge.

